

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Apeldoorn, L. J. (2015). *Pengantar Ilmu Hukum (In Leiding Tot De Studie Van Het Nederlandse Recht)*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Direktorat Jalan Bebas Hambatan dan Perkotaan. (2021). *Dokumen Perencanaan Pengadaan Tanah Jalan Tol Yogyakarta-Bawen (Wilayah Provinsi D. I. Yogyakarta)*. Yogyakarta: Direktorat Jenderal Bina Marga.
- Ferricha, D. (2010). *Sosiologi Hukum Dan Gender*. Malang: Banyu Media.
- Fuady, M. (2007). *Dinamika Teori Hukum*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Hajati, S. (2021). *Politik Hukum Pertanahan Indonesia*. Jakarta: Prenada Media Group.
- Harsono, B. (2003). *Hukum Agraria Indonesia: Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaannya*. Jakarta: Djembatan.
- Huijbers, T. (2010). *Filsafat Hukum Dalam Lintasan Sejarah*. Yogyakarta: Kanisius.
- Luppi, R. (2022). *John Rawls and the Common Good*. New York: Routledge.
- Manullang, E. F. (2017). *Legisme, Legalitas, dan Kepastian Hukum*. Jakarta: Kencana.
- Margono. (2019). *Asas Keadilan, Kemanfaatan dan Kepastian Hukum Dalam Putusan Hakim*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Marzuki, P. M. (2008). *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Marzuki, P. M. (2017). *Penelitian Hukum: Edisi Revisi*. Jakarta: Prenada Media.
- Mcmahon, C. (2022). *Reasonableness and Fairness: A Historical Theory*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Mertokusumo, S. (1993). *Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Mertokusumo, S. (2014). *Mengenal Hukum*. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka.
- Muhaimin. (2020). *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press.

- Nugroho, S. S. (2020). *Metodologi Riset Hukum*. Sukoharjo: Oase Pustaka.
- Nurbani, S. H. (2013). *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Rahardjo, S. (2000). *Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Rawls, J. (1971). *A Theory of Justice*. Massachusetts: Harvard University Press.
- Rawls, J. (2001). *Justice as Fairness: A Restatement*. Massachusetts: The Belknap Press of Harvard University Press.
- Rohmat, N. (2024). *Rekonstruksi Kebijakan Pengadaan Tanah Serta Ganti Rugi Kepemilikan Tanah Untuk Kepentingan Umum Yang Berbasis Nilai Keadilan*. Yogyakarta: K-Media.
- Sarjita, W. U. (2021). *Pengadaan Tanah di Indonesia dan Beberapa Negara dari Masa ke Masa*. Yogyakarta: STPN Press.
- Sumardjono, M. S. (2008). *Tanah Dalam Perspektif Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya*. Jakarta: Kompas.
- Sutedi, A. (2006). *Implementasi Prinsip Kepentingan Umum Dalam Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Suyanto. (2023). *Hukum Pengadaan Tanah dan Pendaftaran Tanah: Kajian Yuridis Dari Undang-Undang 1960 Sampai Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020*. Gresik: Unigres Press.
- Tim Pusat Analisa Kebijakan Hukum dan Ekonomi (2021). *Peta Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja*. Jakarta: Pusat Analisa Kebijakan Hukum dan Ekonomi.
- Yuliandri. (2010). *Asas-Asas Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Yang Baik: Gagasan Pembentukan Undang-Undang Berkelanjutan*. Jakarta: Rajawali Press.

Jurnal:

- Ahmad, F. S. (2022). Dampak Pembangunan Jalan Tol Trans Jawa terhadap Pertumbuhan. *Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Pembangunan*, Vol. 11, No. 1.
- Bardan, I. K. (2018). Mekanisme Pembebasan Dan Pencabutan Hak Atas Tanah. *Jurnal Belom Bahadat*, Vol. VIII No. 2.

- Edor, J. E. (2020). John Rawls's Concept of Justice as Fairness. *Pinisi Discretion Review*, Vol. 4, No. 1.
- Hakim, M. G. (2023). Sengketa Kepemilikan Hak Atas Tanah Dalam Pelaksanaan Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum Guna Pembangunan Jalan Tol Di Kabupaten Lampung Selatan (Studi Putusan No. 13/Pdt.G/20/2018/PN Kla). *Jurnal Hukum Malahayati*, Vol. 4, No. 2.
- Hasanuddin, I. (2018). Keadilan Sosial: Telaah Atas Filsafat Politik John Rawls. *Refleksi*, Vol. 17, No. 2.
- Indrawan, D. P. (2024). Prinsip Keadilan Kompensatoris dan Keadilan Dalam Pelaksanaan Pembangunan Jalur Kereta Api Bandara Soekarno-Hatta. *Yustisi: Jurnal Hukum & Hukum Islam*, Vol. 11, No. 1.
- Isnaeni, D. (2021). Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Jalan Tol Dalam Perspektif Hak Menguasai Negara. *Yurispruden*, Vol. 3, No. 1.
- Jennisa, T. (2023). Efektifitas Undang-Undang Cipta Kerja Terhadap Peningkatan Investasi . *Jurnal Kebijakan Publik*, Vol. 14, No. 2.
- Joesoef, I, E. (2021). Rekonstruksi Pencabutan Hak Atas Tanah Dan Konsinyasi Dalam Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum. *Masalah-Masalah Hukum*, Vol. 50, No. 3.
- Kartika, B. A. (2024). Perbuatan Melawan Hukum oleh Pemerintah dalam Kegiatan Pengadaan Tanah Pembangunan Jalan Tol Medan-Binjai (Studi Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 86/Pdt.G/2019/Pn.Mdn). *UNES Law Review*, Vol. 6, No. 3.
- Kautsar, I. A., & Muhammad, D. W. (2020). Urgensi Pembaharuan Asas-Asas Hukum Pada Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Berdasarkan Teori Keadilan Distributif. *Jurnal Panorama Hukum*, Vol. 5, No. 2.
- Koeswahyono, I. (2006). Melacak Dasar Konstitusional Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Pembangunan Bagi Umum. *Jurnal Konstitusi*, Vol. 1, No. 1.
- Kusumawati, M. P. (2023). Tinjauan Yuridis Permasalahan dan Tantangan Pengadaan Tanah dalam Kerangka Proyek Strategis Nasional (PSN)", *Prosiding Seminar Hukum Aktual Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia*, Vol. 1, No. 3.
- Lestari, P. (2020). Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Demi Kepentingan Umum di Indonesia Berdasarkan Pancasila. *SIGn Jurnal Hukum*, Vol. 1, No. 1.

- Manullang, E. F. (2022). Misinterpretasi Ide Gustav Radbruch mengenai Doktrin Filosofis tentang Validitas dalam Pembentukan Undang-Undang. *Undang: Jurnal Hukum*, Vol. 5, No. 2.
- Mladenovic, I. (2022). Considerations on Democracy in Rawls A Theory of Justice. *Prolegomena*, Vol. 21, No. 1.
- Muqtarib. (2023). Mekanisme Pengadaan Tanah Melalui Bank Tanah Dalam Mendukung Pembangunan Untuk Kepentingan Umum. *Bina Hukum Lingkungan*, Vol. 7, No. 1.
- Nasution, B. J. (2014). Kajian Filosofis tentang Konsep Keadilan Dari Pemikiran Klasik Sampai Pemikiran Modern. *Yustisia*, Vol. 3, No. 2.
- Natanel Lainsamputty, R. S. (2020). Omnibus Law Sebagai Strategi Penataan Regulasi Pertanahan. *Jurnal Saniri*, Vo. 1, No. 1.
- Prasetyo, Y. W. (2022). Keadilan Menurut John Rawls. *Gita Sang Surya*, Vol. 17, No. 4.
- Rahman, C. M. (2021). Kajian Yuridis Pengadaan Tanah Bagi Kepentingan Umum Pasca Berlakunya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja. *Private Law*, Vol. 1, No. 2.
- Ramadhani, B. A., & Kartika, A. W. (2024). Perbuatan Melawan Hukum oleh Pemerintah Dalam Kegiatan Pengadaan Tanah Pembangunan Jalan Tol Medan-Binjai (Studi Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 86/Pdt.G/2019/Pn.Mdn), *UNES Law Review*, Vol. 6, No. 3.
- Rozi, A. (2025). Kajian Terhadap Ganti Rugi Tanah Pada Proyek Pembangunan Tol Kunciran-Bandara Soekarno Hatta. *Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance*, Vol. 4, No. 1.
- Sari, E. (2022). Politik Hukum Pengadaan Tanah Terhadap Tanah Abrasi Pasca Diberlakukan Undang-Undang Cipta Kerja. *Jurnal Ius Constituendum*, Vol. 7, No. 1.
- Sirjon Tenong, M. D. (2021). Tinjauan Yuridis Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021. *Jurnal Yustisiabel*, Vol. 5, No. 2.
- Sitabuana, A. B. (2024). Pemenuhan Asas Keadilan dalam Pemberian Ganti Kerugian Terhadap Pemilik Tanah Akibat Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum. *UNES Law Review*, Vol. 6, No. 3.

- Sujadi, S. (2018). Kajian Tentang Pembangunan Proyek Strategis Nasional (PSN) Dan Keadilan Sosial (Perspektif Hukum Pancasila). *Jurnal Hukum Lingkungan*, Vol. 4, Issue, 1.
- Sunaryo. (2019). Ide Nalar Publik John Rawls dan Daya Tahan Demokrasi. Respons: *Jurnal Etika Sosial*, Vol. 24, No. 1.
- Sunaryo. (2022). Konsep Fairness John Rawls, Kritik dan Relevansinya. *Jurnal Konstitusi*, Vol. 19, No. 1.
- Syahuri, D. R. (2023). Idealitas Penegakkan Hukum Dari Perspektif Teori Tujuan Hukum. *Collegium Studiosum Journal*, Vol. 6, No. 2.
- Westwood, P. A. (2020). The Role of the sense of Justice in Rawls' Theory. *Revista de Filosofia Aurora*, Vol. 32, No. 56.
- Wibowo, S. N. (2021). Kepastian Hukum Ganti Kerugian Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Jalan Tol Cisumdawu . *Acta Diurnal*, Vol. 4, No. 2.

Peraturan Perundang-Undangan:

- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104; Tambahan Lembaran Negara Nomor 2043).
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1961 tentang Pencabutan Hak-Hak Tanah dan Benda-Benda Yang Ada Diatasnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1961 Nomor 288; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1961 Nomor 2324) .
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 Tentang Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 103; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5168).
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 22; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5280).
- Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339).
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856).

- Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 29; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6631).
- Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2023 Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 102; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6885).
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 109 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 mengenai Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 259).
- Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 19).
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 139/PMK/06/2020 tentang Tata Cara Pendanaan Pengadaan Tanah Bagi Proyek Strategis Nasional Oleh Lembaga Manajemen Aset Negara. Lembaga Manajemen Aset Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1110).
- Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2021 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 672).
- Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2022 tentang Penilai Pertanahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1098).
- Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2017 Nomor 1; Tambahan Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1).
- Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 24 Tahun 2024 tentang Pemanfaatan Tanah Kalurahan (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2024 Nomor 24).

Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor: 385/KEP/2020 tentang Penetapan Lokasi Pembangunan Jalan Tol Yogyakarta-Bawen di Daerah Istimewa Yogyakarta.

Keputusan Bupati Sleman Nomor: 14.7/Kep.KDH/A/2017 tentang Status Cagar Budaya Kabupaten Sleman.

Tesis Dan Disertasi:

Esdarwati, S. (2024). *Perlindungan Hukum Bagi Pemilik Tanah Dalam Pelaksanaan Pengadaan Tanah Jalan Tol Yogya-Bawen Ditinjau Dari Aspek Hak Asasi Manusia*. Semarang: Tesis Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Darul Ulum Islamic Centre Sudirman Guppi .

Fatimah, D. A. (2023). *Kesenjangan Hukum dalam Pengadaan Tanah untuk Pembangunan Jalan Tol Yogyakarta-Bawen*. Jakarta: Tesis Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Indonesia.

Guntoro, S. Y. (2023). *Penilaian Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum*. Yogyakarta: Tesis Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada.

Rahmawati, N. D. (2022). *Perlindungan Hukum Terhadap Ahli Waris yang Tanahnya diklaim oleh Pihak Lain (Panitia Pengadaan Tanah) (Studi Kasus Pembebasan Tanah untuk Proyek Jalan Tol Ruas Cinere-Jagorawi)*. Jakarta: Tesis Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Indonesia.

Supriyadi. (2021). *Rekonstruksi Kebijakan Pengadaan Tanah dan Kompensasinya Guna Kepentingan Proyek Strategis Nasional*. Semarang: Disertasi Program Doktor Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Unissula.

Suryanto, F. W. (2024). *Konsinyasi Uang Ganti Kerugian Dalam Pengadaan Tanah Jalan Tol Ruas Tebing Tinggi-Kuala Tanjung (Studi Kasus di Kementerian PUPR Kota Tebing Tinggi)*. Medan: Tesis Magister Hukum, Fakultas Hukum Universitas Islam Sumatera Utara.

Internet:

<https://kependudukan.jogjaprovo.go.id/statistik/penduduk/pekerjaan/17/0/06/04/34.clear>

<https://slemankab.bps.go.id/id/publication/2024/02/28/a5194f8cfd3cc96a35805f6e/kabupaten-sleman-dalam-angka-2024.html>

Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas (KPPIP) (2022, 6 10).
<https://kppip.go.id/publikasi/laporan-semester-kppip/>. Retrieved from
kppip.go.id: <https://kppip.go.id/publikasi/laporan-semester-kppip/>.

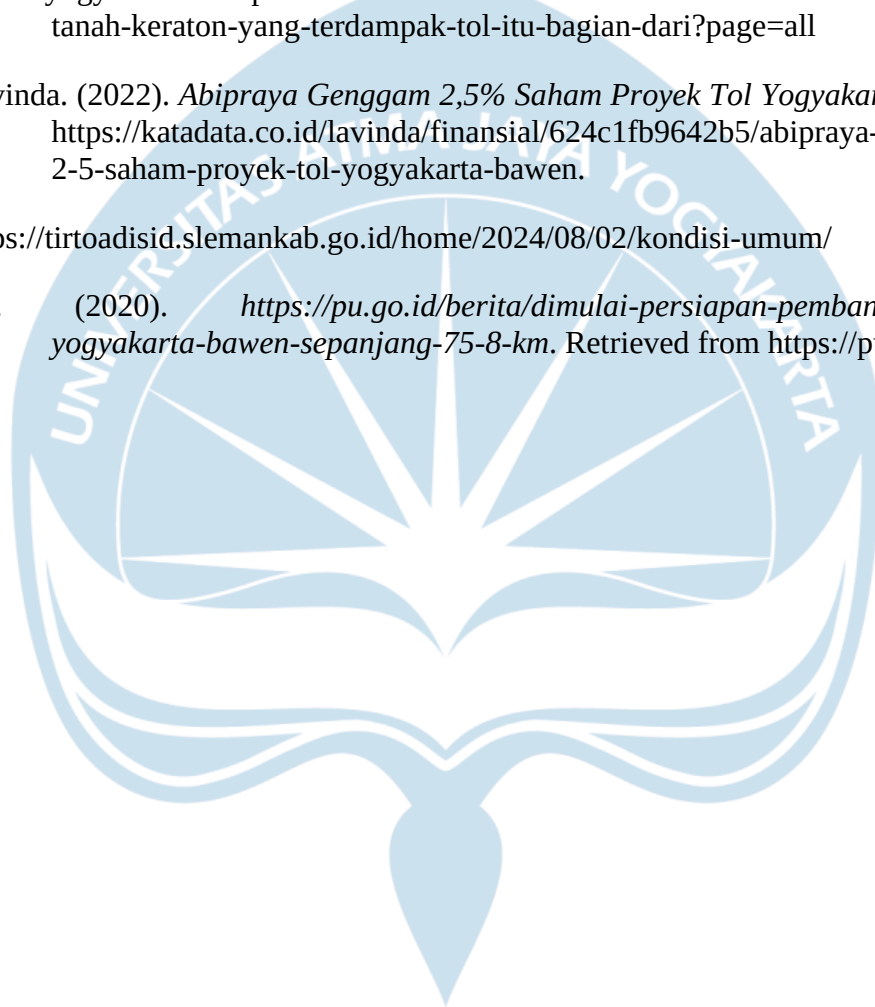
<https://www.kompas.tv/regional/207990/ndalem-mijosastran-markas-pejuang-jaman-belanda-yang-bakal-kegusur-proyek-tol-yogyakarta-bawen>

<https://yogyakarta.kompas.com/read/2023/02/03/082952678/sultan-soal-tak-jual-tanah-keraton-yang-terdampak-tol-itu-bagian-dari?page=all>

Lavinda. (2022). *Abipraya Genggam 2,5% Saham Proyek Tol Yogyakarta-Bawen*.
<https://katadata.co.id/lavinda/finansial/624c1fb9642b5/abipraya-genggam-2-5-saham-proyek-tol-yogyakarta-bawen>.

<https://tirtoadisid.slemankab.go.id/home/2024/08/02/kondisi-umum/>

Tri. (2020). <https://pu.go.id/berita/dimulai-persiapan-pembangunan-tol-yogyakarta-bawen-sepanjang-75-8-km>. Retrieved from <https://pu.go.id>.



LAMPIRAN

A. Lampiran Instrumen Penelitian

1. Pedoman Wawancara Kepada Panitia Pengadaan Tanah

NO	PERTANYAAN
1	Bagaimana proses pelaksanaan pengadaan tanah proyek pembangunan jalan tol yogyakarta bawen?
2	Apa saja permasalahan dan tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaan pengadaan tanah proyek pembangunan jalan to yogyakarta bawen?
3	Sejak kapan proses pengadaan tanah untuk proyek ini dimulai, dan bagaimana progresnya hingga saat ini?
4	Apa dampak perubahan peraturan yang ada seperti UU CK dan Perubahan PP Penyelenggaraan Pengadaan Tanah terhadap pelaksanaan pengadaan tanah proyek ini?
5	Apakah pelaksanaan pengadaan telah sesuai dengan penetapan lokasi yang dibutuhkan oleh instansi yang mengajukan pengadaan tanah?
6	Bagaimana proses sosialisasi dan hasil musyawarah penetapan ganti kerugian pengadaan tanah?
7	Bagimana proses pemberian ganti kerugian terhadap subjek penerima hak terdampak pengadaan tanah?
8	Apakah semua pihak yang menerima ganti kerugian puas terhadap nilai ganti kerugian yang diberikan?

2. Pedoman Wawancara Kepada KJPP Sih Wiryadi & Rekan

NO	PERTANYAAN
1	Apa saja peran dan tanggung jawab penilai publik dalam proses pengadaan tanah untuk proyek jalan tol Yogyakarta-Bawen?
2	Apa saja peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum pelaksanaan pengadaan tanah proyek jalan tol Yogyakarta-Bawen?
3	Apa saja faktor utama yang memengaruhi penilaian harga tanah dalam proyek ini?
4	Apa kriteria penilai yang digunakan untuk menilai ganti kerugian pengadaan tanah?
5	Bagaimana anda memastikan transparansi dalam proses penilaian harga tanah?
6	Apa kendala utama yang muncul dalam proses penilaian publik pengadaan tanah proyek jalan tol Yogyakarta-Bawen?
7	Bagaimana proses penilaian ganti kerugian objek tanah yang terkena pengadaan tanah?
8	Apakah hasil inspeksi lapangan terdapat perbedaan dengan data nominatif dan/atau peta bidang tanah?
9	Seberapa besar perbedaan antara harga pasar dengan harga yang ditetapkan dalam proyek ini?
10	Bagaimana proses musyawarah pemaparan hasil penilaian ganti kerugian pengadaan tanah proyek jalan tol Yogyakarta-Bawen?
11	Apakah ada penolakan dari masyarakat saat proses dan hasil penilaian yang dilakukan? Jika ada apa langkah yang ditempuh untuk mengatasi persoalan tersebut?
12	Apa harapan atau saran saudara terkait dengan proses pengadaan tanah jalan tol Yogyakarta-Bawen? Saran dapat berupa dari segi peraturan atau terkait teknis pelaksanaannya.

3. Pedoman Wawancara Kepada Lurah Tirtoadi dan Kadus Sanggrahan

NO	PERTANYAAN
1	Sejak kapan Anda mengetahui adanya proyek pembangunan jalan tol yang melibatkan wilayah Kalurahan Tirtoadi ini?
2	Siapa saja yang terlibat dalam membantu proses pengadaan tanah di Kalurahan Tirtoadi?
3	Berapa luas wilayah kalurahan Tirtoadi yang terdampak oleh proyek ini?
4	Apakah ada tanah Kalurahan Tirtoadi yang terdampak oleh proyek pembangunan jalan tol ini? Jika ya, berapa luasnya dan apa status hukumnya?
5	Bagaimana proses pembebasan tanah Kalurahan Tirtoadi dilakukan? Apakah sudah ada ganti rugi atau kompensasi yang diberikan
6	Apakah ada fasilitas umum atau sosial (misalnya kantor Kalurahan Tirtoadi, sekolah, tempat ibadah, pasar) yang terdampak oleh proyek ini? Jika ya, bagaimana rencana penggantian atau relokasinya?
7	Bagaimana keterlibatan Kalurahan Tirtoadi dalam proses pengadaan tanah untuk proyek ini?
8	Bagaimana proses musyawarah desa dilaksanakan terkait pengadaan tanah proyek ini?
9	Bagaimana tanggapan warga terhadap besaran ganti rugi yang diberikan? Apakah ada warga yang merasa keberatan atau mengajukan keberatan secara resmi?

10	Apakah ada warga yang mengalami kesulitan akibat proyek ini, misalnya kehilangan mata pencaharian atau tempat tinggal? Jika ya, bagaimana solusi yang diberikan?
11	Bagaimana pemerintah Kalurahan Tirtoadi membantu warga dalam menghadapi dampak proyek ini?
12	Apa yang menurut Anda dapat diperbaiki dalam proses pengadaan tanah untuk proyek jalan tol ini?
13	Adakah rekomendasi atau saran dalam menangani proyek serupa di masa depan?

4. Pedoman Wawancara Kepada Warga Kalurahan Tirtoadi

IDENTITAS RESPONDEN	
Nama:	
Usia:	
Pekerjaan:	
Alamat:	
Luas Tanah Yang Dimiliki:	
Luas Tanah Terdampak Pengadaan Tanah:	
Status Kepemilikan Tanah:	

NO	PERTANYAAN
1	Sejak kapan Anda mengetahui bahwa tanah Anda akan terdampak oleh proyek jalan tol?
2	Bagaimana Anda mendapatkan informasi mengenai proyek ini?
3	Apakah Anda memahami tujuan dari proyek jalan tol ini?
4	Apa pendapat Anda tentang proyek ini? (positif/negatif/netral)

5	Apakah Anda mendapatkan sosialisasi dari pihak terkait mengenai proyek ini? Jika ya, kapan dan bagaimana bentuk sosialisasinya?
6	Bagaimana proses penilaian tanah dilakukan? Apakah Anda merasa proses tersebut adil dan transparan?
7	Bagaimana proses musyawarah penentuan ganti kerugian pengadaan tanah berlangsung?
8	Bagaimana keterlibatan anda dalam proses musyarawah penentuan ganti kerugian pengadaan tanah?
9	Apakah Anda sudah mendapatkan ganti rugi? Jika ya, apakah besaran ganti rugi tersebut sesuai dengan harapan Anda? Jika tidak sesuai, apa keberatan utama Anda terhadap nilai ganti rugi yang diberikan?
10	Apakah Anda mengalami tekanan atau intimidasi selama proses pembebasan lahan? Jika ya, mohon jelaskan.
11	Apakah Anda telah menemukan tempat tinggal atau lahan pengganti? Jika belum, apa kendala utama yang Anda hadapi?
12	Bagaimana kondisi sosial di lingkungan Anda sejak proyek ini dimulai?
13	Apa harapan Anda terhadap pemerintah atau pihak pengelola proyek terkait dengan pembebasan lahan ini?
14	Apa yang menurut Anda bisa diperbaiki dalam proses pengadaan tanah untuk proyek jalan tol ini?

B. Lampiran Dokumentasi Penelitian



Gambar 7 Wawancara dengan Bapak Syamsul Bahri dari Kanwil BPN DIY
Tanggal 13 Februari 2025



Gambar 8 Wawancara Dengan Bapak Mardiharto Lurah Tirtoadi Tanggal 3
Maret 2025



Gambar 9 Wawancara Dengan Ibu Vivi Kadus Sanggrahan Tanggal 5 Maret 2025



Gambar 10 Wawancara Dengan Warga Tirtoadi Bapak Mardiyanto Tanggal 5 Maret 2025



Gambar 11 Wawancara Dengan Warga Tirtoadi Ibu Dewi Lestari Tanggal 5 Maret 2025



Gambar 12 Wawancara Dengan Warga Tirtoadi Bapak Riyanto Tanggal 5 Maret 2025



Gambar 13 Wawancara Dengan KJPP Sih Wiryadi & Rekan Tanggal 14 Maret 2025